

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TUAFANU DALAM
PEMBANGUNAN PARIWISATA PANTAI OETUNE,
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**
*Tuafanu Village Community Participation in Tourism Development
at Oetune Beach, South Timor Tengah District*
Rendra Umbu Leha Kulandima¹, Aldi Herindra Lasso^{2*}

^{1,2}Prodi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin,
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
Indonesia
aldi.lasso@uksw.edu

Diterima: 09 Agustus 2022. Disetujui: 14 Februari 2023. Dipublikasikan: 12 Juni 2023

Abstrak

Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam pembangunan pariwisata. Pemerintah diharapkan berperan dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan berpotensi memberikan dampak positif ataupun negatif bagi partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis partisipasi masyarakat desa Tuafanu dalam pembangunan pariwisata Pantai Oetune sebelum dan sesudah dikelola oleh pemerintah. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan objek wisata Pantai Oetune yang saat ini dikelola oleh pemerintah dengan menggunakan tangga partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Tuafanu pada awal pembangunan pariwisata Pantai Oetune berada pada tingkat derajat kuasa atau kekuatan masyarakat turun pada tingkat partisipasi semu setelah Pantai Oetune dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah yang banyak terfokus pada pembangunan fisik perlu diikuti upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat agar terjaga dan terus meningkat sehingga pariwisata berkelanjutan dapat terwujud.

Kata Kunci: Pantai Oetune, partisipasi masyarakat, pembangunan pariwisata

Abstract

Community participation is essential in tourism development. The government plays a role in encouraging increased community participation. However, in practice, government involvement in management has the potential to have positive or negative impacts on community participation. The purpose of this study was to analyze the presence of the Tuafanu village community in the development of Oetune Beach tourism

before and after being managed by the government. Through a qualitative descriptive method, this study examines the level of community participation in the development of the Oetune Beach tourist attraction. It is currently being managed by the government using the Arnstein participation ladder. The results of the study show that the participation of the Tuafanu village community at the start of Oetune Beach tourism development was at the level of degree of power. In other words, community power dropped to a pseudo-participation level after the government managed Oetune Beach. Therefore, the government's role focuses a lot on physical development needs to be followed by efforts to increase community participation so that it is maintained and continues increasing so that sustainable tourism completes.

Keywords: *Oetune Beach, community participation, tourism development*

©2023 Direktorat Kajian Strategis

PENDAHULUAN

Dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, terdapat hubungan antara keberlanjutan dan partisipasi masyarakat (Rusata, 2019). Pada banyak kasus, pembangunan pariwisata dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat setempat. Di satu sisi, pembangunan pariwisata sendiri diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Hermawan, 2016; Lasso & Dahles, 2021; Nurwanto, 2020). Di sisi lain, pembangunan pariwisata mengalami hambatan jika tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat (Jupir, 2013; Purwaningsih & Mahagangga, 2017). Salah satu model perencanaan pembangunan pariwisata partisipatif adalah pariwisata berbasis komunitas, yakni masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengelola pariwisata sehingga mendapatkan manfaat untuk kehidupan mereka (Anuar & Sood, 2017). Konsep ini merupakan sebuah alternatif strategi pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada keterlibatan dan pengembangan masyarakat.

Pada praktiknya, penerapan konsep pariwisata berbasis komunitas memiliki hambatan-hambatan. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat di sebuah komunitas berbeda dengan yang lainnya. Pembangunan pariwisata juga bergantung pada tingkat penerimaan serta dukungan dari masyarakat (Hilman et al., 2019; Wahyuni, 2018). Pada beberapa daerah, sulit menerapkan konsep tersebut karena keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat, baik di tingkat operasional, struktural, maupun budaya (Beliu & Fina, 2019). Keterbatasan yang dialami pun beragam, seperti pada faktor keuangan, keterbatasan infrastruktur, serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Beliu & Fina, 2019; Elim & Mba, 2021; Palimbunga, 2018; Rahayu et al., 2016). Keterbatasan ini menjadikan komunitas tetap membutuhkan campur tangan pihak luar untuk membantu mereka.

Pemerintah merupakan salah satu pihak luar yang dapat berperan besar dalam membantu komunitas. Namun demikian, keterlibatan pemerintah dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas membawa dampak yang beragam bagi komunitas setempat. Di satu sisi, pemerintah dapat memberikan manfaat kepada komunitas lewat pendampingan

serta pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata yang sudah dilakukan oleh masyarakat di komunitas lokal (Marlina, 2019; Pribudi, 2020). Di sisi lain, keterlibatan pemerintah dalam pembangunan pariwisata lokal, terutama ketika pemerintah berperan dalam pengelolaan destinasi, dapat menimbulkan konflik karena terjadi perampasan tanah dan masalah dalam distribusi pendapatan serta hak pengelolaan objek wisata (Wang & Yotsumoto, 2019). Berdasarkan situasi ini, penting untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, salah satunya dengan menggunakan tangga partisipasi masyarakat. Model partisipasi masyarakat terbagi dalam suatu tingkatan yang dinamakan tangga partisipasi (Arnstein, 1969).

Tabel 1. Tangga Partisipasi Arnstein

8	Kendali Warga (<i>citizen control</i>)	Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat (<i>Degree of Citizen Power</i>)
7	Kuasa yang didelegasi (<i>delegated power</i>)	
6	Kemitraan (<i>partnership</i>)	
5	Penentruman (<i>placation</i>)	Partisipasi Semu (<i>Tokenism</i>)
4	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
3	Pemberian Informasi (<i>information</i>)	
2	Terapi (<i>therapy</i>)	Tidak Partisipatif (<i>Non Participation</i>)
1	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Sumber: Arnstein, 1969

Tabel 1 menunjukkan tangga partisipasi Arnstein bahwa dalam tingkatan Tidak Partisipatif (*Non-Participation*) terdapat 2 tingkat terbawah, yaitu Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*). Tangga manipulasi menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan. Pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, akan memilih dan mengajarkan sejumlah orang sebagai perwakilan dari masyarakat yang harus selalu menyetujui. Pada tangga kedua, yaitu terapi, telah terjalin komunikasi yang bersifat terbatas, inisiatif pun datang dari pemegang kekuasaan (pemerintah), dan berjalan hanya satu arah. Pemerintah sedikit memberitahukan kepada masyarakat mengenai beberapa program yang sudah disetujui oleh wakil masyarakat dan masyarakat lain hanya mendengarkan.

Tangga ketiga sampai kelima masuk dalam kategori Partisipasi Semu (*Tokenism*). Tangga ketiga ialah Pemberian Informasi (*Information*), yakni telah terjalin pemberian informasi dan komunikasi namun masih berjalan satu arah, sarana timbal balik masih minim. Tangga berikutnya ialah Konsultasi (*Consultation*), yakni sudah terjalin komunikasi dua arah namun partisipasi tersebut hanya bersifat formalitas aspirasi masyarakat sudah mulai terjaring, penyelidikan keberadaan masyarakat, ada kemungkinan aspirasi dari masyarakat akan didengarkan tetapi belum menjamin aspirasi tersebut akan dilaksanakan. Kelima adalah tangga yang disebut Penentruman (*Placation*) yang berarti komunikasi sudah berjalan dengan baik, ditandai adanya negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemegang kekuasaan, yakni pemerintah.

Tiga tangga teratas masuk dalam kategori Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat (*Degree of Citizen Power*), yakni pada proses pengambilan keputusan, masyarakat sudah memiliki pengaruh, partisipasi masyarakat telah masuk ke dalam ruang penentuan untuk proses, hasil, serta akibat kebijakan dengan menjalankan Kemitraan (*Partnership*).

Masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam posisi sejajar. Pemerintah memperlakukan masyarakat layaknya rekan kerja. Kuasa yang Didelegasi (*Delegated Power*), yaitu masyarakat, telah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pemerintah dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mendelegasikan beberapa kewenangan kepada masyarakat. Pada tangga Kendali Warga (*Citizen Control*) partisipasi yang penuh dari masyarakat atas suatu keputusan menentukan keberlangsungan suatu kegiatan. Dalam tingkatan ini, fungsi pemerintah sangat minim sedangkan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam memegang kewenangan. Masyarakat lebih mendominasi daripada pemerintah bahkan sampai pada mengevaluasi kerja sehingga dikatakan sebagai partisipasi yang ideal.

Kajian-kajian mengenai pariwisata berbasis komunitas dalam pembangunan pariwisata pada umumnya berfokus pada peran masyarakat, manfaat pembangunan, atau permasalahan terkait partisipasi masyarakat yang terjadi setelah pariwisata dikembangkan (Ahsani et al., 2018; Palimbunga, 2018; Sasongko et al., 2019). Belum banyak ditemukan kajian yang menganalisis partisipasi masyarakat pada saat sebelum dan setelah pengembangan pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan lain. Dengan menggunakan tangga Arnstein, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis partisipasi masyarakat Desa Tuafanu dalam pembangunan pariwisata Pantai Oetune sebelum dan sesudah objek wisata ini dikelola oleh pemerintah. Tangga Arnstein menjadi pisau analisis yang tepat untuk melihat perubahan tingkat partisipasi masyarakat Tuafanu berdasarkan pada indikator pada masing-masing tingkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan lewat pengumpulan serta analisis data yang berupa kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis dan juga perbuatan manusia untuk melihat partisipasi dari masyarakat desa Tuafanu dalam pembangunan pariwisata Pantai Oetune. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi Pantai Oetune, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Pantai Oetune menjadi salah satu destinasi pariwisata yang masuk dalam Kawasan Andalan Pariwisata Daerah karena keunikannya yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lain, yaitu Padang pasir yang luas dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pantai Oetune menjadi objek wisata yang saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata kabupaten TTS sehingga peneliti ingin menganalisis partisipasi masyarakat desa Tuafanu dalam pembangunan objek wisata ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi (pengamatan) terkait kondisi objek penelitian, dalam hal ini objek wisata Pantai Oetune, dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung atau *face to face* dengan partisipan, seperti orang-orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pantai Oetune, masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata yang juga merupakan anggota pokdarwis Oetune. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk memperlengkapi data yang didapat di lapangan.

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara *Snowball sampling*. Seluruh pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan persetujuan dari para informan. Wawancara mendalam dilakukan saat para informan memiliki waktu luang sehingga tidak mengganggu aktivitas keseharian mereka. Peneliti juga menggunakan pendekatan secara adat

dengan membawa sirih dan pinang sebagai simbol adat orang Timor sehingga peneliti diterima masyarakat desa dan pengambilan data bisa terlaksana dengan baik.

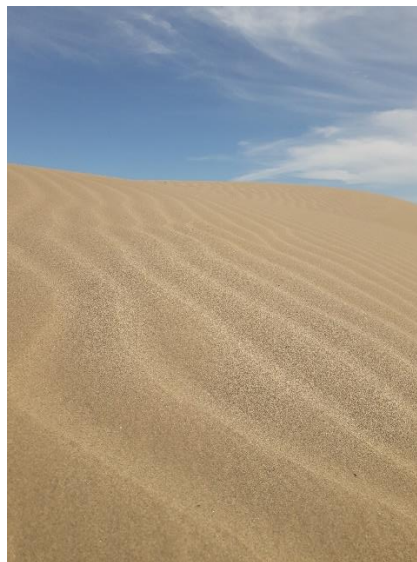
Analisis tematik dipakai dalam penelitian ini. Analisis tematik merupakan salah satu metode analisis data penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi suatu pola atau menentukan tema dari data-data yang sudah dikumpulkan (Junaid, 2016). untuk mengupas secara detail data-data kualitatif, analisis tematik menjadi metode yang efektif karena akan membantu menemukan pola-pola dalam sebuah kejadian dan menjelaskan dari sudut pandang peneliti sejauh mana kejadian itu terjadi (Heriyanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pariwisata di Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Salah satu potensi pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah Pantai Oetune yang berada di desa Tuafanu, kecamatan Kualin, 73 km arah selatan dari kota Soe. Secara geografis, pantai yang terletak pada koordinat 10.0204° Lintang Selatan dan 124.5385° Bujur Timur ini memiliki keunikan berupa gumuk pasir yang terbentang luas sepanjang 100 meter dengan pola-pola yang terbentuk secara alami melalui hembusan angin (Nugraha & Enga, 2021; Tualaka et al., 2018). Selain itu, Pantai Oetune memiliki ombak yang cocok untuk berselancar. Pada bibir pantai banyak terdapat pohon lontar yang menjadi salah satu daya tarik tambahan di area ini.

Menurut sejarah, nama *Oetune* sendiri berasal dari Bahasa Timor yang terdiri atas 2 suku kata yaitu *oe* dan *tune*. *Oe* berarti 'air' dan *tune* berarti 'gawang/lontar' sehingga *oetune* berarti 'air yang keluar dari pohon gawang/lontar' karena terdapat sumber mata air yang berada tidak jauh dari salah satu pesisir pantai dan mata air tersebut sering digunakan untuk minum hewan peliharaan masyarakat. Keberadaan mata air tersebut menjadi cikal bakal nama daerah.



Gambar 1. Gumuk Pasir Pantai Oetune.
Sumber: Data Lapangan, 2021

Berdasarkan gambar 1 di atas, keunikan yang dimiliki Pantai Oetune ialah gumuk pasir yang menjadi daya tarik tersendiri dan area berfoto bagi wisatawan yang berkunjung.

Setiap tahun, jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Terhitung sejak 2015, jumlah wisatawan lokal maupun asing yang berkunjung berjumlah 46.659 orang dan jumlah kunjungan terbanyak pada tahun 2019, yaitu berkisar 62.000 orang (Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2021). Potensi yang dimiliki Pantai Oetune telah menggerakkan masyarakat desa Tuafanu untuk mengembangkan area ini menjadi sebuah destinasi pariwisata.

Pengelolaan Pariwisata di Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Potensi Pantai Oetune mulai menjadi perhatian masyarakat setempat sejak tahun 1995. Awal inisiasi pengembangan Pantai ini muncul dari Bapak Frits Talan selaku orang yang dituakan di wilayah tersebut. Bapak Frits Talan memimpin 9 anggota masyarakat lainnya untuk membersihkan lokasi wisata Pantai Oetune yang masih sangat asri. Berdasarkan arahan Bapak Frits Talan, masyarakat menuju lokasi wisata pada pagi hari untuk bersama-sama mengumpulkan sampah-sampah berupa batang dan daun lontar kering untuk dibakar. Kegiatan ini menjadi cikal bakal terbentuknya kegiatan Jumat bersih di lokasi akses jalan setapak menuju lokasi wisata. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Nofri Talan salah satu warga yang turut berpartisipasi pada awal pembangunan objek wisata Pantai Oetune.

“Waktu awal, kegiatan yang rutin dilakukan itu Jumat bersih. Kita sama-sama membersihkan lokasi wisata dari sampah-sampah. Biasanya tetua-tetua dulu itu yang panggil dengan anggota masyarakat lain untuk bersih-bersih” (N. Talan, 2021).

Masyarakat saat itu begitu antusias untuk bekerja membersihkan lokasi wisata. Meskipun tidak digaji, masyarakat tetap bekerja penuh tanggung jawab karena masyarakat merasa memiliki objek wisata tersebut. Masyarakat setuju bahwa objek wisata Pantai Oetune ini perlu untuk dikembangkan karena potensi yang dimiliki sangat besar.



Gambar 2. Lopo Besar, Bangunan Pertama Hasil Partisipasi Masyarakat Tuafanu
Sumber: Data Lapangan, 2021

Peran aktif masyarakat desa Tuafanu diawali dengan gotong royong secara sukarela membangun sebuah lopo besar (lihat Gambar 2). Bangunan ini menjadi penting karena selain berfungsi sebagai tanda resmi pembukaan pembangunan pariwisata Pantai Oetune yang diinisiasi masyarakat, juga menjadi bukti dari awal partisipasi aktif masyarakat untuk membangun Pantai Oetune secara sukarela. Saat itu, masyarakat dipimpin oleh Bapak Eduard Nabunome (kepala desa) berkoordinasi dengan Bapak Yohanes Liufeto (perwakilan dari Dinas Pariwisata), dan Bapak Frits Talan beserta 9 orang anggota masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Oetune mengumpulkan bahan, seperti alang-alang maupun kayu di lokasi wisata untuk mulai membangun lopo besar tersebut. Semua biaya pembelian bahan merupakan swadaya dari masyarakat sendiri. Sejak saat itu, pengelolaan pantai dilakukan oleh masyarakat sendiri meskipun dengan fasilitas yang terbatas serta jumlah kunjungan wisatawan yang masih belum terlalu banyak.

Semakin dikenalnya Pantai Oetune ditandai dengan ramainya wisatawan lokal yang datang. Pada tahun 2002, masyarakat kembali berinisiatif untuk membangun infrastruktur pendukung berupa enam buah lopo beratap alang-lang serta satu buah toilet sederhana yang dapat dipakai oleh pengunjung dengan biaya ditanggung bersama oleh masyarakat sendiri. Inisiatif dari masyarakat ini yang kemudian menjadi cikal-bakal terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Oetune yang kemudian disahkan oleh pemerintah dalam SK Bupati tahun 2002.

Melihat potensi pariwisata yang ada, pada tahun 2011, Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai mengambil alih pengelolaan Pantai Oetune dengan bermodalkan enam hektar tanah yang dihibahkan oleh tuan tanah setempat. Area ini mencakup daerah di sekitar lokasi wisata sampai pada gumpul pasir. Hal ini dikemukakan oleh bapak Anti Taopan, penjaga objek wisata Pantai Oetune.

“Objek wisata ini sudah berdiri sejak 1995 dari situ kemudian Dinas Pariwisata menyerahkan kepada desa Tuafanu untuk dikelola tapi karena mereka lihat tidak ada perkembangan dari segi infrastruktur, jadi sejak 2011 mereka (Dinas Pariwisata) ambil alih” (Taopan, 2021).

Sejak pengambilalihan tersebut, pembangunan sarana dan prasarana mulai dioptimalkan oleh Dinas Pariwisata dengan diaspalnya jalan masuk ke area pantai, pembangunan empat belas unit lopo kecil permanen di pinggir pantai dan beberapa toilet. Tahun 2012, mulai dibangun fasilitas pendukung lain seperti villa, pagar, *gallery souvenir*, rumah berjualan permanen, *prayer service*, panggung hiburan, dan gardu pandang. Selain itu, perbaikan aksesibilitas juga dilakukan dengan memperbaiki jalan setapak di dekat area pantai. Jaringan listrik yang direncanakan masuk sejak tahun 2019 sudah terpasang dan mulai dirasakan oleh pengunjung serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata. akan tetapi fasilitas seperti *gallery souvenir*, rumah berjualan permanen belum digunakan secara maksimal karena beberapa bagian mengalami kerusakan sehingga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam pengelolaan objek wisata Pantai Oetune, Dinas Pariwisata banyak melakukan pembangunan fasilitas pendukung namun pembangunan tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Konsep pembangunan lebih banyak berasal dari Dinas Pariwisata setempat. Sementara pada proses pembangunan fisik, masyarakat terlibat hanya pada bagian tertentu. Pada tahap awal pembangunan fisik objek wisata ini,

pembangunan fasilitas pendukung dikerjakan oleh pemenang tender proyek pemerintah sehingga masyarakat yang berpartisipasi hanyalah masyarakat yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan dibayar karena ikut bekerja dalam proyek tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Rivan Talan selaku salah satu penjaga objek wisata Pantai Oetune,

“Tidak semua masyarakat ikut kerja untuk jalan masuk dengan pagar keliling. Hanya beberapa saja tapi itu yang pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Mereka menjadi pekerja harian lepas setelah bernegosiasi dengan pemegang tender untuk bisa bekerja di lokasi wisata” (R. Talan, 2021).

Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian memberlakukan retribusi bagi para pengunjung. Desa Tuafanu sendiri tidak mendapatkan pembagian dari hasil dari retribusi tersebut dikarenakan belum adanya peraturan desa yang mengatur pembagian hasil retribusi. Sebagai upaya pelibatan masyarakat, Dinas Pariwisata mengangkat beberapa anggota masyarakat asli desa Tuafanu menjadi tenaga honorer Dinas Pariwisata dan ditempatkan sebagai penjaga Pantai dengan gaji yang disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) sebesar Rp. 1.975.000,00. Tugas mereka adalah menjaga loket karcis dan mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung lalu melaporkan hasil penjualan tiket tersebut kepada Dinas Pariwisata. Setiap akhir bulan, petugas tersebut akan menyerahkan hasil penjualan tiket masuk kepada Dinas Pariwisata. Mereka juga mengikuti rapat evaluasi terkait dengan masalah yang terjadi di lapangan atau meneruskan laporan dari pengunjung. Selain tugas yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, penjaga pantai juga menyiapkan fasilitas penunjang seperti air bersih bagi pengunjung.

Dinas Pariwisata juga melakukan intervensi dalam kepengurusan Pokdarwis dengan mengangkat salah satu penjaga Pantai, yaitu Bapak Rivan Talan, sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Oetune karena beliau merupakan anak dari pemilik tanah yang menghibahkan tanah mereka untuk pengembangan lokasi wisata, yaitu Bapak Frits Talan. Selain itu, bapak Rivan adalah salah satu warga desa Tuafanu yang cukup lama keluar dari wilayah desa Tuafanu dan merantau di pulau Jawa sehingga dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki diharapkan dapat menjalankan tugas tersebut. Sebagai ketua Pokdarwis Oetune, bapak Rivan Talan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata apabila ada kegiatan yang akan diselenggarakan di lokasi wisata untuk menyiapkan tempat maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Bapak Rivan juga mempersiapkan anggota untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

Sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang dimiliki, Dinas Pariwisata melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek). Kegiatan sosialisasi sadar wisata ditujukan kepada seluruh masyarakat desa Tuafanu. Tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman pariwisata kepada masyarakat desa Tuafanu sehingga tercipta iklim yang kondusif terhadap perkembangan pariwisata di Pantai Oetune. Akan tetapi sosialisasi tersebut tidak datang dari kebutuhan warga dan merupakan inisiatif pihak dinas. Topik-topik yang dipilih juga merupakan ide dari pihak dinas, sehingga masyarakat desa Tuafanu tidak terlalu menaruh perhatian saat kegiatan berlangsung. Masyarakat datang hanya untuk mendapatkan uang saku dari kegiatan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rivan Talan yang merupakan penjaga objek wisata Pantai Oetune.

“Pernah Dinas Pariwisata turun ke desa Tuafanu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat (biasa yang diundang adalah masyarakat yang dituakan) dan masyarakat yang hadir juga itu karena ada uang duduk” (R. Talan, 2021).

Selain itu, pelatihan yang dilakukan masih sangat terbatas, hanya 1 atau 2 hari saja sedangkan para anggota pokdarwis Oetune membutuhkan pendampingan serta evaluasi hasil kerja mereka oleh pemerintah. Pantai Oetune juga sering mendapat kunjungan dari tamu-tamu penting, seperti Kementerian, sehingga seringkali ada koordinasi antara Dinas Pariwisata dan pihak desa Tuafanu serta Pak Rivan Talan untuk mempersiapkan penyambutan di lokasi wisata. Penyambutan tersebut biasanya berupa penampilan tarian adat oleh ibu-ibu masyarakat desa Tuafanu. Kelompok ini biasanya dibagi dalam kelompok penari dan pemain musik tradisional. Setelah penyambutan di lokasi wisata usai, biasanya para penari akan mendapatkan imbalan atau uang sirih pinang oleh Dinas Pariwisata sebagai tanda terima kasih karena sudah berpartisipasi. Imbalan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat dan sebagian juga akan disimpan sebagai kas untuk membeli perlengkapan menari.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Objek Wisata di Pantai Oetune Berdasarkan Tangga Arnstein

Merujuk pada tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein, terlihat bahwa pada awal pengembangan Pantai Oetune, masyarakat desa Tuafanu memiliki kendali penuh dalam pengembangan Pantai Oetune. Mereka merencanakan, mengendalikan, dan mengimplementasikan penuh pembangunan objek wisata Pantai Oetune. Kemandirian yang mereka miliki saat itu masuk dalam tahap Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat (*Degree of Citizen power*) atau partisipasi masyarakat secara penuh terhadap objek wisata Pantai Oetune. Meskipun hanya memberikan kontribusi berupa tenaga, waktu serta materi lokal, masyarakat berada pada tingkatan teratas dari tangga partisipasi, yaitu Kedali Warga (*Citizen Control*). Yang terjadi pada masyarakat Tuafanu pada awal pembangunan sama dengan temuan dari Sasongko dalam pembangunan pariwisata Hutan Pinus Kragilan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat (Sasongko et al., 2019). Melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat ikut dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pembagian tugas kerja. Dalam periode ini, masyarakat dengan bebas menyampaikan pendapat mereka terkait ide pengembangan objek wisata tersebut serta bekerjasama dalam pelaksanaan ide yang disampaikan.

Tingkat partisipasi masyarakat Tuafanu bergeser pada tahapan pembangunan lopo besar. Saat itu mulai ada campur tangan pemerintah dalam pembangunan objek wisata Pantai Oetune. Pada periode ini masyarakat desa masuk dalam tahap Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat (*Degree of Citizen power*) atau partisipasi masyarakat secara penuh terhadap objek wisata Pantai Oetune tetapi berada pada tahapan Kemitraan (*Partnership*) (Arnstein, 1969). Masyarakat berada pada posisi sejajar dengan pemerintah. Pemerintah memperlakukan masyarakat selayaknya rekan kerja terutama dalam mendukung pembukaan Pantai Oetune. Mereka juga mulai bermitra dalam merancang dan mengimplementasikan aneka kebijakan publik dalam hal yang ditunjukkan dengan pengesahan SK Bupati tahun 2002 mengenai pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Oetune.

Sejak diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata pada tahun 2011, masyarakat memang tetap dilibatkan dalam pembangunan pariwisata namun berdasarkan temuan di lapangan, partisipasi masyarakat jauh berbeda dengan awal pembangunan objek wisata. Partisipasi masyarakat menjadi terbatas pada orang-orang yang memiliki posisi atau keahlian tertentu saja. Masyarakat desa Tuafanu berperan sebagai penjaga pantai, ikut dalam pembangunan infrastruktur di lokasi wisata, dan membuka usaha berjualan. Akan tetapi berbeda dengan awal masa perintisan ketika partisipasi masyarakat merupakan inisiatif masyarakat itu sendiri, pada masa pembangunan oleh Dinas Pariwisata, partisipasi masyarakat lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi.

Masyarakat berpartisipasi karena ada imbalan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan juga menurun karena inisiatif pengembangan berasal dari Dinas Pariwisata. Terlihat bahwa masyarakat desa Tuafanu menjadi sangat bergantung kepada pemerintah dan tidak berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan temuan Ahsani, masyarakat desa wisata Candirejo tidak bergantung pada pemerintah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, baik dalam pelaksanaan, fasilitas, serta dana (Ahsani et al., 2018). Masyarakat desa Tuafanu hanya akan berpartisipasi ketika diminta oleh Dinas pariwisata.

Hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan objek wisata Pantai Oetune berada dalam tahap Partisipasi Semu (*Tokenism*). Dalam kategori ini, ada partisipasi masyarakat dan pendapat mereka sudah didengar tetapi masyarakat tidak mampu menjamin bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan sehingga memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Sejak diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, koordinasi dan inisiasi pembangunan yang berjalan masih cenderung satu arah. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pariwisata namun hanya sebagai pendukung dalam kepentingan Dinas Pariwisata, berbeda dengan awal pembangunan objek wisata dimana masyarakat yang lebih berinisiatif untuk membangun objek wisata Pantai Oetune.

Masyarakat desa Tuafanu berpartisipasi dalam musyawarah untuk merencanakan pengembangan desa yang didalamnya termaksud pengembangan objek wisata Pantai Oetune namun keputusan akhir serta langkah-langkah berikutnya di tangan pemerintah. Peran dari masyarakat terbatas pada memberi masukan, ide, saran yang diharapkan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata berada dalam tahap Konsultasi (*Consultation*), yakni masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka namun tidak ada kepastian bahwa perhatian atau ide mereka diperhitungkan atau diwujudkan meskipun sudah dilaksanakan dialog dua arah oleh masyarakat dengan pemerintah. Tingkat keberhasilan dari proses ini rendah karena tidak ada jaminan bahwa ide, opini dari masyarakat akan diperhatikan. Masyarakat desa Tuafanu memang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta saran dalam pengembangan objek wisata Pantai Oetune namun keputusan akhir ada pada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk mewujudkan aspirasi, ide atau pendapat dari masyarakat.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam pembangunan pariwisata. Masyarakat dilibatkan oleh Dinas Pariwisata dalam pembangunan wisata Pantai Oetune sebagai penjaga pantai, anggota Pokdarwis, koordinator kegiatan di lapangan, pedagang serta penyambut tamu di objek wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur di lokasi wisata yang dilakukan oleh pemerintah tidak menjadi jaminan adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa Tuafanu dalam pembangunan pariwisata Pantai Oetune.

Berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat desa Tuafanu mengalami degradasi, sebelumnya berada pada Tahapan Kendali Warga (*Citizen Control*) namun setelah pembangunan pariwisata diambil alih pemerintah, partisipasi masyarakat Tuafanu berubah menjadi Partisipasi Semu (*Tokenism*). Bila keadaan ini berlanjut, tidak tertutup kemungkinan partisipasi masyarakat terus tergerus sehingga menjadi Tidak Partisipatif (*Non Participan*) dalam pembangunan objek wisata Pantai Oetune.

Tulisan ini memberikan rujukan bahwa dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas, partisipasi masyarakat dan manfaat yang diperoleh masyarakat tetap harus menjadi prioritas pembangunan selain memprioritas pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan:

1. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah harus diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat sehingga partisipasi masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat dan berdampak pada tumbuhnya rasa memiliki masyarakat terhadap objek wisata Pantai Oetune dan
2. Dari sisi keilmuan, kajian tentang pembangunan pariwisata berbasis masyarakat perlu melihat tingkat partisipasi yang terjadi di masyarakat dalam rentang kajian jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 135–146. <https://doi.org/10.26905/PJIAP.V3I2.2270>
- Anuar, A. N. A., & Sood, N. A. A. M. (2017). Community Based Tourism: Understanding, Benefits and Challenges. *Journal of Tourism & Hospitality*, 6(1). <https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000263>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Beliu, J. J., & Fina, Y. N. (2019). Kajian Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Conference on Public Administration and Society*, 1(1), 139–152. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/view/24>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2021). *Rekapitulasi Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik di Kabupaten Timor Tengah Selatan*.
- Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 23–32. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2021.V09.I01.P03>

- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/ANUVA.2.3.317-324>
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117. <https://doi.org/10.31294/PAR.V3I2.1383>
- Hilman, Y. A., Saeful, M., & Aziz, A. (2019). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata “Watu Rumpuk” Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 3(2), 54–66. <https://doi.org/10.34013/JK.V3I2.7>
- Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 10(1), 59–74. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/NPVQU>
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28–37. <https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/105/pdf>
- Lasso, A. H., & Dahles, H. (2021). A Community Perspective on Local Ecotourism Development: Lessons from Komodo National Park. *Tourism Geographies*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1953123>
- Marlina, N. (2019). Kemandirian Masyarakat Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism: Studi Kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17–26. <https://doi.org/10.14710/JIIP.V4I1.4735>
- Nugraha, Y. E., & Enga, E. R. L. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten TTS: Studi Kasus Daya Tarik Wisata Pantai Oetune. *Media Wisata*, 19(1), 67–73. <https://doi.org/10.36276/MWS.V19I1.67>
- Nurwanto. (2020). Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata Menggunakan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kawasan Wisata Tebing Breksi. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 109–124. <https://doi.org/10.47608/JKI.V14I22020.109-124>
- Palimbunga, I. P. (2018). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Tabalansu, Papua. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5(1), 193–210. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.V05.I01.P10>
- Pribudi, A. (2020). Community-based Approach to Sustain Batik Tourism Village Area in the Special Region of Yogyakarta (The Case of Giriloyo Village). *Journal of Social Science*, 1(4), 113–122. <https://doi.org/10.46799/JSS.V1I4.47>
- Purwaningsih, N. P. E., & Mahagangga, I. G. A. O. (2017). Hambatan Desa Munggu Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 187–194. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2017.V05.I02.P02>
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.13111>
- Rusata, T. (2019). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus Situs Gunung Padang Cianjur. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 13(2), 79–96. <https://doi.org/10.47608/JKI.V13I22019.79-96>
- Sasongko, G., Trianggono, B., & Wiloso, P. G. (2019). Development of Community-Based Tourism in Pinusan Kragilan, Pogalan Village, Magelang Regency, Central Java, Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 7(3), 156–165. <https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/372/281>

- Tualaka, T. M. C., Subroto, Y. W., & Wijono, D. (2018). Presepsi Wisatawan Terhadap Potensi Kepariwisata Wisata Alam Pantai Oetune di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.22146/JNP.59466>
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 85–102. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V9I1.994>
- Wang, L., & Yotsumoto, Y. (2019). Conflict in Tourism Development in Rural China. *Tourism Management*, 70, 188–200. <https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2018.08.012>